

---

**MASUKNYA PROSTITUSI DAN KEBERADAAN PENYAKIT KELAMIN  
DI KALANGAN MILITER HINDIA BELANDA**

Oleh

Lucia Arter Lintang Gritantin

Universitas Khairun ternate

Email: [luciagritantin@gmail.com](mailto:luciagritantin@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 04-02-2022

Revised: 24-02-2022

Accepted: 19-03-2022

**Keywords:**

Prostitusi, Penyakit, Militer  
Hindia Belanda

**Abstract:** keberadaan kekuatan militer dalam sebuah negara akan menentukan kekuatan negara tersebut. Begitupun dengan keberadaan negara Hindia Belanda yang tidak akan pernah lepas dari pengaruh kekuatan militernya. Kekuatan militer juga merupakan institusi modern pada masanya dan sebagai penentu berbagai modernitas yang terjadi, militer juga memiliki peran sebagai agen modernitas. Maka tidak mengherankan apabila elemen - elemen di dalamnya juga mengandung unsur modernisasi. Salah satu elemen yang mengalami modernitas adalah elemen kesehatan, yang ditandai dengan keberadaan rumah sakit militer sebagai sarana pemerintah dalam sistem kesehatan Hindia Belanda . Rumah sakit merupakan elemen penting sebagai menjadi sarana untuk menjaga kesehatan para anggota militer Hindia Belanda. Kesehatan para anggota militer menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan kekuatan pemerintah kolonial. Salah satu hal yang menjadi kekawatiran pemerintah Hindia Belanda terhadap Kesehatan para anggota militer adalah adanya wabah penyakit kelamin yang menjangkiti para anggota militer. Salah satu penyakit yang menyerang selama berada di daerah perang adalah penyakit yang berasal dari virus penyakit kelamin, seperti Herpes, Syphilis, Morbiveneris dan beberapa penyakit kelamin lainnya . Virus - virus ini banyak ditemukan di lingkungan sosial militer. Baik virus yang dibawa dari lingkungan sosial selama bertugas di daerah maupun lingkungan sosial di dalam barak.

---

**PENDAHULUAN**

keberadaan kekuatan militer dalam sebuah negara akan menentukan kekuatan negara tersebut. Begitupun dengan keberadaan negara Hindia Belanda yang tidak akan pernah lepas dari pengaruh kekuatan militernya. Kekuatan militer juga merupakan institusi modern pada masanya dan sebagai penentu berbagai modernitas yang terjadi, militer juga memiliki peran sebagai agen modernitas. Maka tidak mengherankan apabila elemen -

elemen di dalamnya juga mengandung unsur modernisasi. Salah satu elemen yang mengalami modernitas adalah elemen kesehatan, yang ditandai dengan keberadaan rumah sakit militer sebagai sarana pemerintah dalam sistem kesehatan Hindia Belanda<sup>1</sup>.

Rumah sakit merupakan elemen penting sebagai menjadi sarana untuk menjaga kesehatan para anggota militer Hindia Belanda. Kesehatan para anggota militer menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan kekuatan pemerintah kolonial. Salah satu hal yang menjadi kekawatiran pemerintah Hindia Belanda terhadap Kesehatan para anggota militer adalah adanya wabah penyakit kelamin yang menjangkiti para anggota militer. Salah satu penyakit yang menyerang selama berada di daerah perang adalah penyakit yang berasal dari virus penyakit kelamin, seperti *Herpes*, *Syphilis*, *Morbiveneris* dan beberapa penyakit kelamin lainnya<sup>2</sup>. Virus - virus ini banyak ditemukan di lingkungan sosial militer. Baik virus yang dibawa dari lingkungan sosial selama bertugas di daerah maupun lingkungan sosial di dalam barak.

Serangan beberapa virus penyakit kelamin yang menyebabkan banyaknya anggota militer terjangkit beberapa jenis penyakit kelamin cukup meresahkan pemerintah Hindia Belanda sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Keresahan pemerintah Hindia Belanda tersebut dikarenakan banyaknya laporan tentang jumlah anggota militer yang terserang penyakit kelamin. Hingga akhir abad ke-19 pun jumlah anggota militer yang terjangkit penyakit kelamin semakin meningkat. Seperti yang pernah dilaporkan oleh Dinas Kesehatan mengenai data anggota militer yang terjangkit penyakit kelamin<sup>3</sup>. Banyaknya jumlah anggota militer yang terjangkit penyakit kelamin maka keberadaan dunia militer sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab menopang dan menjaga stabilitas keamanan dan kekuatan pemerintah kolonial akan terancam. Latar belakang banyaknya virus penyakit kelamin yang menjangkiti para anggota militer inilah yang menyebabkan perlunya tulisan mengenai keberadaan penyakit kelamin di kalangan militer Hindia Belanda.

## METODE PENELITIAN

---

<sup>1</sup> *Penyakit Kelamin di Kalangan Korps Militer Hindia Belanda 1860an-1920an* Thesis karya Lucia Arter Lintang Gritantin, hlm 1.

<sup>2</sup> Di dalam data – data arsip tidak ditemukan data – data yang menjelaskan nama – nama virus lain tersebut. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan dunia kesehatan pada masa kolonial belum semaju saat ini.

<sup>3</sup> Dalam data arsip disebutkan bahwa; untuk kasus *morbiveneris* paling banyak terjadi pada tahun 1887 dan 1889. Sedangkan paling sedikit terjadi pada tahun 1873. Sedangkan untuk kasus penyakit *Syphilis* sendiri mengalami peningkatan jumlah penderita ada di tahun 1882. Sedangkan untuk jumlah pengidap paling sedikit ada di tahun 1873. Sumber BT. 10 Agustus 1891 No. 4; *Burgelijck Geneeskundige Dienst van 260*, tanggal 8 April 1891.

Menurut *Trisnantoro* kebijakan kesehatan diasumsikan untuk merangkum segala arah tindakan (dan dilaksanakan) yang mempengaruhi tatanan kelembagaan, organisasi, layanan dan aturan pembiayaan dalam sistem kesehatan. Kebijakan ini mencakup sektor publik (pemerintah) sekaligus sektor swasta. Tetapi karena kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor penentu di luar sistem kesehatan, para pengkaji kebijakan kesehatan juga menaruh perhatian pada segala tindakan dan rencana tindakan dari organisasi di luar sistem kesehatan yang memiliki dampak pada kesehatan<sup>4</sup>.

Berpacu pada kebijakan kesehatan menurut Trisnantoro maka penulis dalam penelitian ini, telah melakukan proses pengerjaan dan penyusunan melalui tahap – tahap mengumpulkan dan merangkum beberapa penyebab dari segala arah. Baik dari dalam sistem kesehatan maupun dari luar sistem kesehatan, serta kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang memberikan pengaruh besar dalam menentukan kesehatan para anggota militer, yang secara khusus menjadi penyebab masuk dan menjangkitnya wabah penyakit kelamin di kalangan militer Hindia Belanda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyakit kelamin bukanlah hal yang dengan begitu saja muncul di kalangan militer Hindia Belanda. Penyakit kelamin atau biasa disingkat dengan P.M.S memiliki beberapa faktor pendorong hingga dapat menular dan meningkat. Djuanda di dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin Edisi Ke-3* memberikan penjelasan bahwa secara keseluruhan dapat dilihat bahwa ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya insiden P.M.S, antara lain adalah ;

- a. Perubahan demografik secara luar biasa;
- b. Peledakan jumlah penduduk.
- c. Pergerakan masyarakat yang bertambah dengan berbagai alasan. Antara lain adalah;
  - Pekerjaan
  - Hiburan
  - Pariwisata
  - Rapat/kongres/seminar/dan sebagainya.
- a. Kemajuan sosial ekonomi terutama dalam bidang industri menyebabkan lebih banyaknya perubahan kebebasan sosial dan lebih banyak waktu yang terluang.
- b. Perubahan sikap dan tindakan akibat perubahan demografik di atas, terutama dalam bidang agama dan moral.
- c. Kelalaian beberapa Negara dalam memberikan pendidikan, kesehatan dan pendidikan seksual khususnya.

---

<sup>4</sup> Trisnantoro. L, *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumahsakit*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004. Dalam karya tulisan Baha' Uddin, *Politik Kesehatan Masyarakat di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Yogyakarta, hlm 2.

- d. Perasaan aman pada penderita karena pemakaian obat antibiotik dan kontrasepsi.
- e. Akibat pemakaian obat antibiotik tanpa petunjuk yang sebenarnya. Sehingga tumbuh kuman dalam obat tersebut.
- f. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai terutama fasilitas laboratorium dan klinik yang kurang memadai.
- g. Banyaknya kasus asimtomatik<sup>5</sup>, merasa tidak sakit tapi dapat menulari orang lain<sup>6</sup>.

Faktor-faktor di atas dapat dijumpai dalam perjalanan sejarah kesehatan pada umumnya dan mengenai penyebab masuknya penyakit kelamin di kalangan militer Hindia Belanda khususnya.

Beberapa faktor diatas disebutkan Djuanda bahwa keadaan politik, ekonomi dan sosial masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam proses P.M.S. Hal tersebut sejalan dengan keadaan politik, ekonomi dan sosial masyarakat di Negara Hindia Belanda sepanjang abad ke-19. Keadaan sosial, politik dan ekonomi sepanjang abad ke-19 merupakan salah satu faktor penentu kebijakan pemerintah dalam hal kesehatan. Berikut adalah keadaan politik, ekonomi dan sosial sepanjang abad ke-19.

Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat pada tahun 1800an masih didominasi dengan peraturan yang mengatur mengenai tanah. Baik Rouffaer maupun Van Vollenhoven menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan Eropa beserta pelaksanaannya mempengaruhi sifat dari pola pemilikan tanah di Jawa. Tahun-tahun puncak dalam proses ini adalah tahun 1813-1814, ketika Raffles memperkenalkan sistem *Landrente* di banyak karesidenan. Pada tahun 1818-1819, ketika para komisaris umum Belanda (1816-1819) menerbitkan versi peraturan *Landrente* yang telah diubah. Lalu pada tahun 1830 Van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa<sup>7</sup>.

Keberadaan ekonomi dan politik pada tahun 1800an dapat pula dilihat dari hak politik dan ekonomi Raja atas tanah yang dapat dijabarkan sebagai berikut menurut Soemarsaid Moertono: Hak politik atau hak publik adalah hak untuk menetapkan luas daerah hukumnya. Hak tersebut hanya menetapkan batas-batas daerah yang membolehkan Raja mengaturnya menjalankan pengadilan dan mempertahankan dari serangan musuh. Sedangkan hak ekonomi adalah hak ini berhubungan dengan tanah dalam artian hak mengenai pengaturan tentang hasil tanah sesuai adat<sup>8</sup>. Jika pendapat tersebut diperhatikan,

---

<sup>5</sup> Kasus asimtomatik adalah suatu penyakit dimana pasien tidak menyadari gejala apapun. Sehingga ketidaksadaran ini akan terungkap bila pasien melakukan tes medika.

<sup>6</sup> Adhi Djuanda, *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin Edisi Ke 3*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1999, hlm. 338.

<sup>7</sup> Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda, Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795 - 1880*, Jakarta: KITLV dan Djembatan, 2004, hlm. 81.

<sup>8</sup> Moertono, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*, *Study Tentang Masa Mataram II Abad XVI - XIX*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1985), hlm. 134-135.

maka rakyat yang berada di tanah-tanah Raja sama halnya tidak memiliki tanah itu sendiri. Sehingga mereka hanya menumpang tinggal di tanah tersebut. Munculnya aturan bagi seseorang yang menumpang tempat atau tinggal, makan yang bersangkutan harus menjalankan kerja wajib, orang-orang ini sering disebut *bahu suku*<sup>9</sup>.

Melalui penjelasan tersebut maka, hak milik Raja adalah keuangan yang berhubungan dengan tanah tersebut. Dalam hal ini sebagai penyewanya adalah para orang Eropa<sup>10</sup>. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Prof. Van Vollenhoven yang dikutip oleh S. Moertono: Raja hanya memiliki hak atas sebagian hasil tanah itu sendiri dan sebagian lainnya diberikan kepada pemberi modal, yang mana mereka adalah para pemodal asing sebagai pengontraknya.

Tahun 1870an merupakan puncak masuknya para pemodal asing, khususnya dalam hal ekonomi perkebunan. Berkembangnya ekonomi perkebunan mengakibatkan banyaknya sistem sosial dalam masyarakat mengalami pergeseran dan perubahan. Nasib para pekerja juga mengalami banyak perubahan. Sistem pembayaran dan perputaran modal mengalami banyak kemajuan. Proses ini tidak berjalan secara singkat dan mudah. Banyak alur ekonomi dan akibat sosial yang terjadi. Bentuk perusahaan barat pun pernah masuk ke dalam sejarah penanaman usaha di wilayah Hindia Belanda, namun mengalami kegagalan<sup>11</sup>.

Salah satu masalah sosial yang muncul karena perubahan ekonomi dan sosial sepanjang abad ke-19 adalah prostitusi. Meskipun berbagai macam perubahan sosial dan ekonomi yang telah terjadi sepanjang abad ke-19, prostitusi tidak lantas mati. Prostitusi masih terus mampu untuk terus berkembang dan mampu masuk ke dalam lapisan masyarakat manapun. Salah satu lapisan masyarakat yang berhasil dimasuki oleh prostitusi sepanjang abad ke-19 adalah lapisan militer.

Dalam kehidupan para lelaki militer di daerah Hindia Belanda biasanya merasakan aktivitas seksual adalah sebuah bagian dari kehidupan para lelaki yang bersifat minus. Selain itu standarisasi kehidupan moral para anggota militer dapat dilihat dari ketahanan diri mereka untuk tidak minum minuman keras. Jika mereka mampu melakukan hal tersebut, maka mereka akan diberikan label baik. Namun seberapa tinggi pun pencapaian seorang pria, mereka pada akhirnya membutuhkan seorang wanita. Demikian pula dengan derajatnya terutama dalam hal menahan hawa nafsu. Disini terlihat bahwa adanya kecenderungan secara alamiah bahwa kenyataan ekonomi adalah hal yang lebih utama disepanjang abad ke-19 daripada masalah kualitas moral<sup>12</sup>.

Sehingga pada akhirnya para anggota militer ataupun bukan militer bisa memiliki

---

<sup>9</sup> Warsino, *Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 175-177.

<sup>10</sup> A.K Pringgodigdo, *Sejarah Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, (Surakarta: Reksopustoko, 1987), hlm. 30.

<sup>11</sup> P. Creutzberg, *Sejarah Statistik Indonesia*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 241.

<sup>12</sup> Hanneke Ming, *Barak – Concubinate In The Indies 1887-1920*, (Cornel South Asia Program, 1983), hlm. 70.

---

seorang pendamping wanita tanpa adanya standar moral yang jelas. Melainkan hanya berdasarkan pada kualitas ekonomi yang baik saja. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi sepanjang abad ke-19 adalah sebagai pusat kebutuhan yang utama. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah tersendiri dalam masyarakat Jawa. Hal ini juga disebabkan yang dapat menikmati kesejahteraan hanya pada kalangan tertentu saja. Sehingga hal tersebut memunculkan gejolak sosial. Akibat dari gejolak sosial tersebut adalah munculnya golongan masyarakat Pribumi yang terdesak secara ekonomi. Sehingga salah satu cara untuk keluar dari masalah desakan ekonomi tersebut adalah dengan menjadi seorang pelacur<sup>13</sup>. Kenyataan mengenai kemiskinan inilah yang pada akhirnya melahirkan banyak wanita tunasusila di Hindia Belanda atau menjadi seorang *Nyai* bagi para lelaki Eropa yang bisa memberikan kehidupan yang layak dan berkecukupan secara ekonomi<sup>14</sup>.

Kenyataannya banyaknya wanita tunasusila yang masuk dalam kehidupan para lelaki militer Hindia Belanda menjadi awal berkembangnya prostitusi di kalangan militer. Masuknya wanita tunasusila ke dalam dunia militer bukanlah karena sebab. Salah satu yang menjadi sebab mereka masuk ke dalam dunia lelaki militer adalah munculnya beberapa peraturan di militer yang membatasi siapa saja yang bias mendapat izin untuk menikah secara legal. Seperti yang terdapat pada kebijakan tahun 1872, No; 62. Kebijakan berisi dan mengatur tentang ijin untuk kontrak perkawinan secara legal. Dalam kebijakannya pemerintah hanya bisa memberi izin kepada;

- a. Semua anggota setaraf Sersan Mayor.
- b. Semua anggota bersenjata, para penjaga, pemimpin korps, para juru tulis yang sudah memenuhi syarat, artillery dan personel mesin, staff Rumah Sakit; secara umum, semua anggota militer yang dipertimbangkan untuk masuk dalam prajurit tetap.
- c. Sisannya NCOs dan tentara tingkat bawah dan yang tidak terdaftar di dalam kategori a dan b, mungkin dapat dipertimbangkan dalam perintah Jenderal tahun 1878 no 21.<sup>15</sup>

Sehingga bagi golongan militer yang tidak diberikan izin menikah legal hanya bisa mendapatkan pernikahan secara tidak legal. Inilah menjadi salah satu penyebab banyaknya wanita tunasusila masuk ke dunia militer, karena tidak adanya pengawasan langsung dari pemerintah Hindia Belanda pada para anggota militer tingkat bawah<sup>16</sup>.

Melalui peraturan tersebut maka kegiatan seks terselubung wanita tunasusila dan para prajurit militer tingkat bawah semakin tidak terbandung. Berjalannya waktu tingkah laku seks bebas para anggota militer tingkat bawah dengan para wanita tunasusila semakin tinggi dan memprihatinkan. Keprihatinan ini memunculkan sebuah aturan tegas mengenai para anggota militer yang tinggal satu atap secara tidak resmi dengan para wanita tunasusila dan *gundik*. Adanya sanksi penundaan kepangkatan bagi para anggota militer yang ketahuan

---

<sup>13</sup> Denys Lombard, *Silang Budaya Jilid 3*. (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 157.

<sup>14</sup> Lucia Arter Lintang Gritantin, *ibid* hlm 72.

<sup>15</sup> Hanneke Ming., *op.cit.*, hlm. 70.

<sup>16</sup> Lucia Arter Lintang Gritantin, *ibid* hlm 74.

melakukan pelanggaran tersebut<sup>17</sup>. Keberadaan aturan baru tersebut tidak lantas menghentikan kegiatan prostitusi di barak-barak prajurit militer. Dengan adanya peraturan tersebut justru semakin membuat para anggota militer terdorong untuk melakukan prostitusi terselubung dan sembunyi-sembunyi, sehingga pemerintah Hindia Belanda dan para petinggi militer tidak mengetahui keberadaan prostitusi tersebut<sup>18</sup>.

Prostitusi terselubung yang dilakukan di barak-barak militer semakin lama semakin terlihat akibatnya. Beberapa akibat yang ditimbulkan dari prostitusi terselubung para anggota militer dengan para wanita tunasusila adalah mulai munculnya penyakit kelamin. Seperti salah satu laporan mengatakan bahwa adanya penyakit kelamin yang disebabkan oleh aktivitas prostitusi di beberapa wilayah adalah surat Residen Manado pada tanggal 13 Juli 1889 No. 1321 kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, di dalam surat tersebut dituliskan bahwa;

*Residen Manado memberitahukan ada banyak orang terkena penyakit Syphilis sebagai akibat dari merajalelanya prostitusi yang dilakukan baik oleh pribumi maupun bangsa timur asing di daerah Gorontalo.*

*Untuk itu diusulkan untuk mendirikan bangunan atau Rumah Sakit khusus menangani penderita tersebut. Asisten Residen Manado menerangkan bahwa di Gorontalo tidak ada sal-sal untuk menampung penderita dan para militer yang terkena penyakit ditempatkan sementara waktu di ruang provost di dalam benteng. Di sana yang ada hanya tempat tahanan sehingga penderita tidak mendapatkan perawatan cepat dan mengakibatkan penyebaran yang semakin luas.*

*Jumlah penderita yang harus dirawat setiap hari adalah 20 orang wanita tunasusila pada tanggal 26 Juni telah diadakan pemeriksaan kesehatan terhadap 22 orang wanita dan 17 si antaranya positif mengidap Syphilis<sup>19</sup>.*

Laporan dari residen Manado terkait masalah mulai menyebar dan menjangkiknya penyakit *Syphilis* memberikan gambaran bahwa penyakit kelamin yang ditimbulkan sudah mulai mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan dicantumkan laporan bahwa terdapat anggota militer yang terjangkit penyakit kelamin.

Melalui laporannya nampak bahwa dalam proses penanganan anggota militer dan beberapa masyarakat sipil yang menderita *Syphilis* pemerintah di daerah kurang siap secara medis sehingga harus menempatkan mereka di benteng *Provos*. Tempat tersebut umumnya hanya digunakan untuk para tahanan militer. Karena ketidaksiapan inilah menjadi salah satu faktor pendukung penyebaran penyakit kelamin. Sedangkan untuk di Jawa sendiri keberadaan penyakit kelamin *syphilis* lebih banyak berkembang di kota-kota yang menjadi pusat pemukiman orang-orang Eropa. Menurut Ingleson, penyakit kelamin pada abad ke-19 semakin meluas keberadaannya setelah tahun 1870 dengan semakin berkembangnya perusahaan perkebunan swasta asing di Jawa. Namun meskipun demikian pembangunan Rumah Sakit *Syphilis* pertama pernah didirikan oleh Raffles di Yogyakarta pada tahun 1811<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Hanneke Ming., *ibid.*, hlm. 67.

<sup>18</sup> Lucia Arter Lintang Gritantin, *ibid* hlm 74.

<sup>19</sup> Gedag 1477/90. Dalam buku: Djoko Utomo, *Pemberantasan Prostitusi Di Indonesia Masa Kolonial*, (Jakarta: ANRI, 2001), hlm. 67.

<sup>20</sup> John Ingelson. *Prostitution in Colonial Java dalam David P. Chandler and M.C*

Kebijakan pembangunan Rumah Sakit ini kemudian diteruskan oleh pihak Hindia Belanda dengan mendirikan bangunan-bangunan yang terbuat dari bambu disekitar areal prostitusi. Bangunan ini dimaksudkan untuk menampung para pasien penderita penyakit kelamin terutama para wanita pelacur. Kemunculan Rumah Sakit (*stadsverband*) di kota-kota besar Jawa mulai pada pertengahan abad ini kemudian dijadikan sebagai tempat penampungan para pelacur yang mengidap penyakit kelamin<sup>21</sup>.

Keberadaan penyakit kelamin di dunia militer pada pertengahan abad ke-19 hingga akhir abad ke-19 dapat dikatakan mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah anggota militer yang terjangkit beberapa penyakit kelamin. Sebelum melihat laporan data para anggota militer yang terkena wabah penyakit kelamin sebagai gambaran sejauh mana keadaan penyakit kelamin di kalangan para anggota militer Hindia Belanda, perlu dilihat terlebih dahulu seperti apa penyakit kelamin dalam dunia kedokteran<sup>22</sup>.

Penyakit kelamin adalah penyakit yang cara penularannya terutama melalui hubungan seksual. Cara berhubungan kelamin tidak hanya terbatas secara genitor-genital saja, tetapi juga dapat secara oro genital atau ano genital. Sehingga kelainan yang timbul akibat penyakit kelamin ini tidak hanya pada daerah genital saja. Tetapi juga daerah-daerah ekstra genital<sup>23</sup>. Menurut Sjaiful Fahmi Daili pada waktu dahulu penyakit kelamin dikenal sebagai *Venereal Diseases (V.D)* yang termasuk di dalamnya adalah *Syphilis, Gonore, Ulkus Mole, Limfogranuloma Venereum dan Granuloma Inguinale*. Istilah ini semakin lama semakin ditinggalkan dan diganti dengan *Sexually Transmitted Diseases (S.T.D)* yang berarti penyakit-penyakit kelamin yang ditularkan melalui hubungan kelamin<sup>24</sup>.

Pada tabel 1 di bawah ini dapat dilihat mengenai jumlah anggota militer yang menderita penyakit kelamin sejak tahun 1870 hingga 1890. Pada laporan tersebut, dilaporkan bahwa kasus penyakit *Syphilis* sejak tahun 1870-1890 tidak mengalami peningkatan yang sangat tajam. Hal ini berbeda dengan kasus penyakit kelamin *Morbiveneris*. Penyakit *Morbiveneris* jumlahnya terlihat lebih ekstrim dalam perkembangannya karena jumlah penderitanya lebih banyak ketimbang *Syphilis*. Peningkatan jumlah yang cukup tinggi pada anggota militer yang menderita *Morbiveneris* justru terjadi pada tahun 1880 dan 1887. Sedang penurunan jumlah penderita *Morbiveneris* secara drastis justru terjadi antara tahun 1884 - 1886. Tapi jika dilihat secara keseluruhan dari hasil laporan data kesehatan militer, keberadaan penyakit kelamin *Morbiveneris* tetap mengalami peningkatan paling tinggi ketimbang penyakit kelamin *Syphilis*<sup>25</sup>.

Berikut adalah data-data jumlah anggota militer yang terjangkit penyakit kelamin

---

Riklef (ed) *Nineteenth and twentieth century Indonesia*, (Victoria: Southeast Asia Studies Monash University, 1986), hlm. 123.

<sup>21</sup> D. Schoute, *Occidental Therapeutics in The Netherlands East Indies During Three Centuries of Netherlands Settlement (1600 - 1900)*, (The Hague; Netherlands Indian Public Health Service), hlm. 28.

<sup>22</sup> Lucia Arter Lintang Gritantin, *ibid* hlm 78.

<sup>23</sup> Lihat Bab PMS karya Sjaiful Fahmi Daili dalam Adhi Djuanda, *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin Edisi Ke 3*. (Jakarta, Balai Penerbit FKUI,1999). hlm 9.

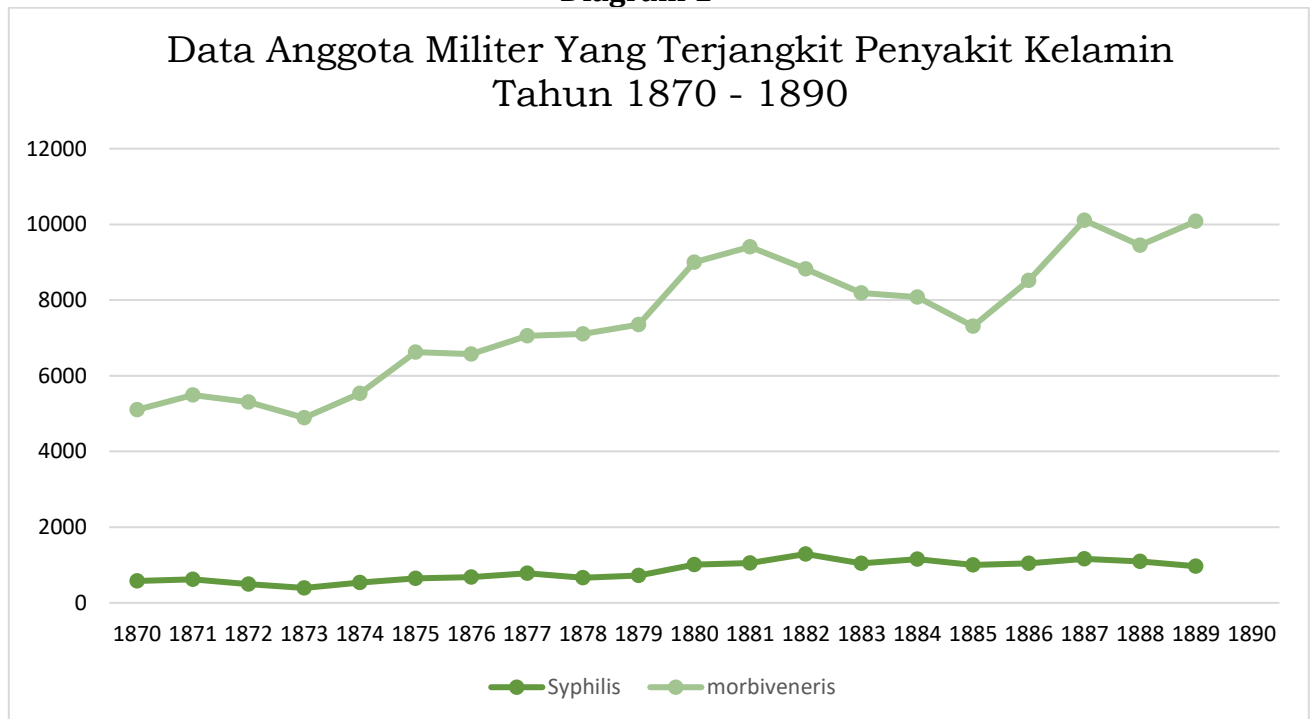
<sup>24</sup> Sjaiful Fahmi Daili dalam Adhi Djuanda *ibid* hlm 10.

<sup>25</sup> Lucia Arter Lintang Gritantin, *ibid* hlm 79



dan jenis-jenis penyakit kelamin yang menyerang anggota militer Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19 hingga akhir abad ke-19.

**Diagram 1**



**Sumber :** BT. 10 Agustus 1891 No. 4. *Burgelijk Geneeskundige Dienst van 260*, Tanggal 8 April 1891.

**Tabel 1**  
**Tabel Jenis Penyakit Kelamin dan Jumlah Penderita**  
**Sejak Tahun 1891 - 1899**

Tahun	Urethritis	Ulc.Mole	Ulc.durum	Syphilis	Total
1891	14	6	3	1	24
1892	32	4	0	9	45
1893	41	4	1	3	49
1894	48	6	0	6	60
1895	45	4	2	9	60
1896	31	1	1	0	33
1897	56	3	0	2	61
1898	48	5	2	4	59
1899	39	1	3	1	44

**Sumber:** Dinas Kesehatan Militer tanggal 10 Oktober 1899 kepada Ketua Komisi Kesehatan di 's-Gravenhage.

Pada tabel 1 berisi tentang data laporan jenis-jenis penyakit kelamin yang menyerang para anggota militer. Pada laporan tersebut melaporkan bahwa ada 4 jenis penyakit yang menyerang para anggota militer sejak tahun 1891 - 1899. Empat jenis penyakit tersebut adalah : *Urethritis*, *Ulc.Mole*, *Ulc.durum* dan *Syphilis*. Dari empat jenis penyakit kelamin tersebut yang paling banyak menjangkiti para anggota militer adalah *Urethritis*. Jumlah anggota yang terjangkit setiap tahunnya berjumlah puluhan jiwa. Sedangkan puncak penderita dari keseluruhan wabah penyakit kelamin yang mewabah di kalangan anggota militer berada pada tahun 1897, dimana jumlah penderitanya mencapai 61 orang dalam satu tahun<sup>26</sup>.

Muncul adanya laporan data yang menyebutkan bahwa ada banyaknya penderita penyakit kelamin di kalangan anggota militer Hindia Belanda, membuktikan bahwa penyakit kelamin yang terjadi sepanjang abad 19 bukanlah hal yang sepele. Dengan banyaknya para penderita dari kalangan militer maka dampak negatif yang cukup besar terhadap pertahanan militer pun bisa terjadi. Munculnya himbuan dari para kepala kesatuan militer untuk segera menganggulangi masalah wabah penyakit kelamin, merupakan sebuah ketakutan yang cukup besar bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap wabah penyakit kelamin di kalangan

militer. Karena hal tersebut dapat menjadi sebuah ancaman besar bagi pertahanan dan keamanan pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19<sup>27</sup>.

Keberadaan penyakit kelamin di kalangan militer sepanjang abad ke-19 sebagai sebuah ancaman besar bagi pemerintah Hindia Belanda dapat dilihat dari surat Komandan Departemen Pertahanan Dan Keamanan di Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Pada surat tersebut disebutkan bahwa perlunya pengawasan yang ketat terhadap perdagangan perempuan dan pengawasan prostitusi sebagai upaya mencegah maraknya penyakit kelamin di kalangan anggota militer Hindia Belanda. Hal yang lebih mengejutkan bahwa pengawasan daerah yang potensi dengan kegiatan prostitusinya harus dijaga oleh anggota Polisi<sup>28</sup>.

Selain masalah pertahanan dan keamanan yang terancam karena banyaknya anggota militer yang terjangkit penyakit kelamin, pemerintah juga mengalami kekhawatiran dalam hal biaya penyembuhan para anggota militer. Hal tersebut dikarenakan dana yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk penyembuhan sangat besar. Biaya ini dapat dilihat dari laporan permohonan biaya untuk penyembuhan penyakit kelamin yang dilakukan oleh *Algemeene Rekenkamer* yang memohonkan biaya perjalanan bagi para wanita tunasusila yang mengidap penyakit kelamin<sup>29</sup>.

Banyaknya tindakan yang harus dilakukan pemerintah Hindia Belanda dalam menjaga dan mempertahankan legitimasi kekuatan militernya. Memunculkan banyaknya usaha yang ditempuh serta besarnya pengeluaran biaya yang harus dilakukan membuat pemerintah Hindia Belanda perlu untuk melakukan penerangan dan sosialisasi secara terus menerus ke desa-desa dan kampung-kampung, mengenai resiko dan kerugian akibat adanya prostitusi, terlebih untuk prostitusi terselubung<sup>30</sup>. Adanya dampak dan keberadaan wabah penyakit kelamin yang menyerang para anggota militer Hindia Belanda serta sosialisasi tentang protitusi, Pemerintah Hindia Belanda belajar untuk lebih memperhatikan masalah kesehatan para anggota korps militer di wilayah Hindia Belanda.

## KESIMPULAN

Penyakit kelamin di kalangan anggota militer Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 merupakan salah satu peristiwa epidemi yang terjadi di wilayah Hindia Belanda. Dimana dalam proses penularan epidemi penyakit kelamin tersebut salah satunya melalui media prostitusi. Pada prosesnya sepanjang akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, penyakit kelamin banyak ditularkan oleh para anggota militer dan para pelacur yang sering berganti-ganti pasangan ketika berhubungan seks. Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan juga menjadi salah satu faktor penularan penyakit kelamin. Sehingga epidemi penyakit kelamin yang menyerang anggota militer Hindia Belanda merupakan sebuah konsekuensi kesehatan yang harus dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda.

Epidemi penyakit kelamin yang menyerang anggota militer Hindia Belanda tidak hanya sebuah masalah kesehatan yang serius bagi pemerintah Hindia Belanda, melainkan

---

<sup>27</sup> Lucia Arter Lintang Gritantin, *ibid* hlm 86

<sup>28</sup> Djoko Utomo, *Pemberantasan Prostitusi Di Indonesia Masa Kolonial*, (Jakarta: ANRI, 2001), hlm. 40.

<sup>29</sup> Djoko Utomo, *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>30</sup> Djoko Utomo, *Ibid.*, hlm. 147.

juga masalah serius di dalam dunia militer Hindia Belanda sendiri. Hal ini dikarenakan dengan epidemi penyakit kelamin dapat menghambat produktifitas kerja para anggota militer. Selain menghambat, epidemi penyakit kelamin juga memakan banyak korban meninggal dunia, sehingga banyak kesatuan militer yang harus kehilangan anggotanya karena menjadi korban epidemi penyakit kelamin. Peristiwa ini merupakan pembelajaran besar bagi pemerintah Hindia Belanda dalam bidang kesehatan terutama terkait masalah kesehatan di dunia militer <sup>31</sup>.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.K Pringgodigdo, *Sejarah Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko, 1987.
- [2] Adhi Djuanda, *Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin Edisi Ke 3*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1999.
- [3] D. Schoute, *Occidental Therapeutics in The Netherlands East Indies During Three Centuries of Netherlands Settlement (1600 - 1900)*, The Hague; Netherlands Indian Public Health Service, 1937.
- [4] Denys Lombard, *Silang Budaya Jilid 3*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- [5] John Ingelson. *Prostitution in Colonial Java dalam David P. Chandler and M.C Riklef (ed) Nineteenth and twentieth century Indonesia*, Victoria: Southeast Asia Studies Monash University, 1986.
- [6] Lucia Arter Lintang Gritantin *Penyakit Kelamin di Kalangan Korps Militer Hindia Belanda 1860an-1920an*, Thesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- [7] Moertono, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Study Tentang Masa Mataram II Abad XVI – XIX*, Jakarta: Yayasan Obor, 1985.
- [8] P. Creutzberg, *Sejarah Statistik Indonesia*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1987
- [9] Peter Boomgaard, *Anak Jajahan Belanda, Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795 – 1880*, Jakarta: KITLV dan Djembatan, 2004.
- [10] Trisnantoro. L, *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumahsakit*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- [11] Warsino, *Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, Yogyakarta: LKIS, 2005.
- [12] **arsip**
- [13] BT. 10 Agustus 1891 No. 4. *Burgelijk Geneeskundige Dienst van 260*, Tanggal 8 April 1891.
- [14] Dinas Kesehatan Militer tanggal 10 Oktober 1899 kepada Ketua Komisi Kesehatan di 's-Gravenhage.
- [15] Gedag 1477/90. Dalam buku: Djoko Utomo, *Pemberantasan Prostitusi Di Indonesia Masa Kolonial*, Jakarta: ANRI, 2001.
- [16] **Jurnal**
- [17] Baha` Uddin, *Politik Kesehatan Masyarakat di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Yogyakarta.

Hanneke Ming, *Barak - Concubinate In The Indies 1887-1920*, Cornell South Asia Program, 1983.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN